

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI
Jl.Ahmad Yani No. 13 Telp. (021) 885 2144
BEKASI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmad-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024 dapat kami susun. Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja adalah dokumen perencanaan pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, demikian juga sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 tersebut Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024. Besar harapan kami dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bagian dalam sistem perencanaan baik internal maupun eksternal Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

Drs. ASEP GUNAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660320 198603 1 011

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu dilaksanakan pembangunan di sektor ketenagakerjaan dengan berbagai macam kegiatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat didayagunakan secara optimal, efektif dan efisien.

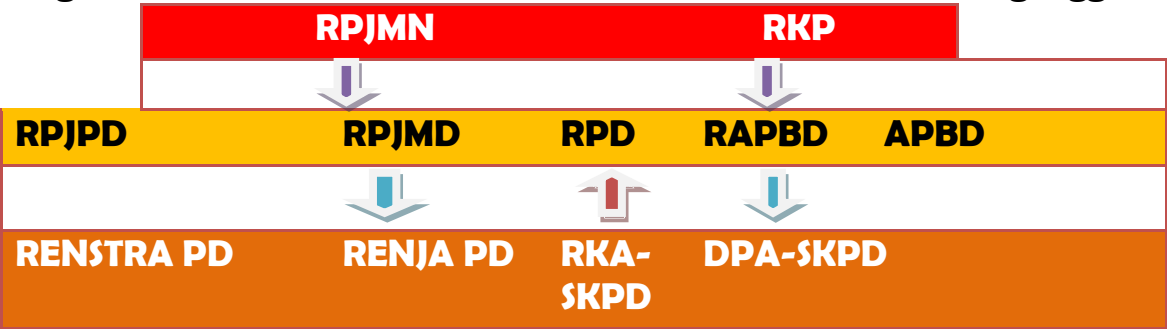
Dinas Tenaga Kerja untuk menyusun Renja Dinas Tenaga Kerja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis tiga tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tenaga Kerja adalah dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kota Bekasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Dinas Tenaga Kerja dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 , sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPD) dan Renstra Dinas Tenaga Kerja yang menjadi satu kesatuan. Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Keterangan:

 dipedomani dan/ataudiacu

 dipedomani dan/ataudiacu

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2023 sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dan pada akhirnya Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi (**RKA-SKPD**) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum.

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara RI tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3458);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4817);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 23.

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
25. sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat;
- 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
- 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
- 32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
- 33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);
- 34. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah;
- 35. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/paguindikatif pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024 adalah:

- 1. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2024 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;
- 2. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024-2026 pada tahun ke-3(ke-tiga) periode tahun 2024; dan
- 3. Memudahkan Evaluasi kinerja dan Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja

1.4 Sistimatika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

BAB	I	PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang; 1.2. Landasan Hukum; 1.3. Maksud dan Tujuan; dan 1.4. Sistematika Penulisan.
BAB	II	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi ; 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi; 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan 2.5. PenelaahanUsulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB	III	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional; 3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi 3.3. Program dan Kegiatan.
BAB	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI
BAB	V	PENUTUP

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2024 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2024, serta pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahu 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut :

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Pencapaian
Renstra Dinas Tenaga Kerja s/d Tahun 2018-2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ outcome Kegiatan output	Target Kinerja capaian program (renstra)	Realisasi kinerja hasil program dan pengelu- aran kegiatan tahun n- 3	Capaian realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja tahun n- 1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja perangkat daerah tahun n- 2 ()	Realisasi renja perangkat daerah (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	17.383.765.980						15.875.000.000			
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase Cakupan Ketersediaan Dokumen	%		100%	15.621.002.980			100%	15.875.000.000
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan		2 Laporan	3.000.000			2 Laporan	
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5 Laporan	3.000.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	5 Laporan	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	%		100%	12.377.033.000			100 %	12.400.000.000
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			882 Org/bln	12.374.033.000		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	882 Org/bln	12.400.000.000
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan			5 Laporan	3.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PAD		5 Laporan

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD													
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		100%	20.000.000							100%	50.000.000	
Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	20.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PAD				5 Orang	50.000.000	Disnaker
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100%	376.925.000						100%		
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Unit	10.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PAD				25 Unit		Disnaker
2.07.01.0.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1600 paket	324.925.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PAD				1600 paket		Disnaker
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 paket	35.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PAD				2 paket		Disnaker
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	7.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PAD				10 Laporan		Disnaker
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100%	2.470.644.980						100%	2.660.000.000	
2.07.01.0.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4000 Srt/ Dokumen	15.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PAD				4000 Srt/ Dokumen		Disnaker
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	338.400.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PAD				60 Laporan	360.000.000	Disnaker
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan, Jumlah Tenaga Kebersihan, Jumlah Tenaga Pelayanan Umum				5 org/bln 5 org/bln 40 org/bln	2.117.244.980	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PAD				5 org/bln 5 org/bln 40 org/bln	2.300.000.000	Disnaker

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

		Kantor												
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	%	100%	373.400.000						100%	765.000.000	
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			7 Unit	122.400.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PAD				7 Unit	200.000.000	Disnaker
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			0 Unit	26.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PAD				0 Unit	150.000.000	Disnaker
2.07.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			0 Unit	25.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PAD				0 Unit	70.000.000	Disnaker
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0 Unit	50.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PAD				0 Unit	190.000.000	Disnaker
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0 Unit	150.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PAD				0 Unit	155.000.000	Disnaker
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	%	%	100%	983.955.000						100%		
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peningkatan kompetensi bagi pencari kerja	%	%	100%	724.450.000						100%		
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n			290 orang	724.450.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan dan Kelurahan	PAD		Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan daya saing tenaga kerja		290 orang		Disnaker
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase peningkatan kompetensi bagi pencari kerja	%	%	100 %	19.455.000						100 %		
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga	Jumlah sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi			60 rekomendasi	19.455.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	PAD		Perluasan kesempatan kerja serta		60 rekomendasi		Disnaker

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi							n dan Kelurahan			peningkatan daya saing tenaga kerja				
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang mendapat konsultansi produktivitas	perusahaan		perusahaan	65 perusahaan	66.450.000					65 perusahaan			
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultansi peningkatan produktivitas				50 Perusahaan kecil	66.450.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan dan Kelurahan	PAD		Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan daya saing tenaga kerja	Perusahaan Kecil	50 Perusahaan kecil		Disnaker
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase peningkatan kompetensi bagi pencari kerja	%		%	100 %	173.600.000					100 %			
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				2 Dokumen	173.600.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan dan Kelurahan	PAD		Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan daya saing tenaga kerja	Tenaga Kerja dan Perusahaan	2 Dokumen		Disnaker
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan	%		%	62,09%	258.295.000					62,09%			
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kab/Kota	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan Lainnya untuk Peningkatan Kompetensi	sertifikat		sertifikat	1 sertifikat	109.020.000					1 sertifikat			
2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainnya untuk Peningkatan Kompetensi				80 Orang	109.020.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan dan Kelurahan	PAD		Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan daya saing tenaga kerja	Petugas Pelayanan Antar Kerja	80 Orang		
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah job fair yang dilaksanakan Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kali pencari kerja		Kali pencari kerja	1 kali 300 pencari kerja						1 kali 300 pencari kerja			Disnaker
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				300 pencari kerja	97.385.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan dan Kelurahan	PAD		Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan daya	Pencari Kerja Penduduk Kota Bekasi	300 pencari kerja		Disnaker

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

								n			saing tenaga kerja				
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota	Jumlah CPMI dan P3MI yang mengikuti Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	orang		orang	90 orang	51.890.000						90 orang		
										Nasiona l	Daerah				
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				90 Orang	51.890.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan dan Kelurahan	PAD		Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan daya saing tenaga kerja	CPMI ber-KTP Kota Bekasi dan P3MI yang berada di Kota Bekasi	90 Orang		Disnaker
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penanganan sengketa pengusaha dengan pekerja	%		%	100%	520.513.000						100%		
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina Jumlah Peringatan Hari Buruh Tingkat Kota Bekasi Jumlah Rekomendasi UMK Kota Bekasi Tahun 2024	Lembaga Event Dokumen		Lembaga Event Dokumen	1 Lembaga 1 Event 1 dokumen	520.513.000						1 Lembaga 1 Event 1 Dokumen		
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				1 Perkara	322.019.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan dan Kelurahan	PAD		Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan daya saing tenaga kerja	Pemerintah Kota Bekasi, Apindo Kota Bekasi dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Kota Bekasi	1 Perkara		Disnaker
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan				100 Perkara	79.079.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan dan Kelurahan	PAD		Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan daya saing tenaga kerja	Pemerintah Kota Bekasi, Apindo Kota Bekasi dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Kota Bekasi	100 Perkara		Disnaker
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kab/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	119.415.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan dan Kelurahan	PAD		Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan daya saing tenaga kerja	Pemerintah Kota Bekasi, Apindo Kota Bekasi dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Kota Bekasi	1 Lembaga		Disnaker

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabang Hukum	

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Capaian Kinerja

Nilai	Kategori	Warna	Notifikasi
$\geq 80\%$	Tercapai	Hijau	
60% - 79%	Kurang Tercapai	Kuning	
$\leq 59\%$	Tidak Tercapai	Merah	

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.3
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program (Renstra Perangkat Daerah)	Program (Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020)	Notifikasi
1	2	3
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
Peningkatan Disiplin Aparatur		
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Program Penempatan tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
1. Adanya Kerjasama dengan dinas terkait, dengan Cevest ,BLK Propinsi dan BLK Swasta .	Memaksimalkan kegiatan pelatihan maupun fasilitasi penempatan tenaga kerja sesuai anggaran yang ada.	Memaksimalkan kegiatan pelatihan maupun fasilitasi penempatan tenaga kerja sesuai anggaran yang ada.
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial	
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan tercapai 100 % dengan penyebab diantaranya : 1. salah satu pihak yang berselisih adanya kesepakatan sehingga berlanjut ketingkat mediasi 2. berselisih dari awal mempunyai keinginan kuat untuk menyelesaikan di Tingkat mediasi Hubungan Industrial		

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sampai dengan tahun 2023 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8		9	10		11		12	13
1	Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	170	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20 %	25 %	25 %	60%	80 %	100 %	
2	Besaran Tenaga Kerja yang berbasis kewirausahaan	149	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20 %	30 %	25 %	70 %	80 %	100%	
3	Besaran Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis masyarakat	149	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	15 %	25 %	35 %	70 %	80 %	100 %	
4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama / PB	447	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Program jamsostek	4.380	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	30 %	20 %	80 %	90 %	100 %	
6	Besaran pencari kerja yang terdaftar ditempatkan	7.632	7.500 org	7.500 org	7.500 orang	7.500 orang	7.500 orang	7.500 orang	5000 orang	7.500 Orang	7.500 orang	7.500 orang	7.500 orang	
7	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang memiliki keahlian	23	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20 %	25 %	35 %	30 %	70 %	100 %	
8	Meningkatnya tenaga kerja yang terdaftar ditempatkan	17.225	35 %	40 %	70 %	75 %	100 %	35 %	40 %	25 %	40 %	30	100%	
9	Persentase Pengusaha melakukan UMK yang telah ditetapkan	1.590	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
10	Menurunnya angka sangketa pengusaha dengan pekerja	134	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Secara umum Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi telah melaksanakan fungsi pelaksanaan tugas teknis operasional dan penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi ketatalaksanaan yang baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam satu rantai kerja kedinasan guna memberikan pelayanan di bidang ketenagakerjaan di daerah. Indikator umum untuk **keberhasilan** pelaksanaan fungsi ini adanya tingkat kepuasan pada dasarnya sehingga tersedianya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran. Pada tahun 2022 terdapat jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebesar 7.500 orang, jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan sebesar 4.593 orang, sedangkan pencari kerja yang dilatih sebanyak 2.907 orang.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja, maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah pelayanan di sektor ketenagakerjaan meliputi penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor ketenagakerjaan, menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu- isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun **kegagalan** yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Permasalahan yang kerap dihadapi pada Dinas Tenaga Kerja adalah :

1. Masih cukup besarnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2. Rendahnya produktifitas tenaga kerja
3. Tidak semua pencari kerja dan perusahaan melaporkan penempatan tenaga kerjanya ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, sehingga akan mempengaruhi data tenaga kerja yang ditempatkan karena pada kenyataannya jika ada lowongan pekerjaan.
4. Masih adanya sangketa pengusaha dan pekerja, walau dapat diselesaikan tingkat mediasi

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor tenaga kerja serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, yakni sebagai berikut:

- a. Peningkatan jumlah penyerapan angkatan kerja
- b. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.4. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada Tahun 2023 dilaksanakan secara kuisioner berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, sehingga pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat juga menggunakan indikator penilaian kepuasan masyarakat yang mendasarkan 9 unsur yang diwajibkan dalam peraturan tersebut yang meliputi:

1. Persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan
3. Waktu penyelesaian yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan. Seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
4. Biaya/tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara. Segala jenis pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tidak dipungut biaya atau **GRATIS.**
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

6. Kompetensi pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

Untuk semua jenis penerima layanan setiap tahun di Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Target
1	2	3
1	Persyaratan	100 %
2	Prosedur	100 %
3	Waktu Pelayanan	100 %
4	Produk Spesifikasi Jenis	100 %
5	Biaya/Tarif	0 %
6	Produk Spesifikasi Jenis	100 %

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

7	Layanan	100 %
8	Kompetensi Pelaksana	100 %
9	Sarana Prasarana	100 %
10	Penanganan Pengaduan,Saran,dan Masukan	100 %

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

2.5. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi terdapat beberapa faktor pendorong maupun faktor penghambat dalam hal peningkatan pelayanan baik dari kondisi internal dan eksternal, antara lain:

Kondisi Internal

a. Faktor Pendorong

- 1) Kota Bekasi memiliki potensi sebagai daerah kawasan industri alternatif sebagai Penyangga Ibu Kota Jakarta , banyak terdapat pengusaha baik formal karena banyak lahan-lahan buat usaha kecil. dimanfaatkan serta angkatan kerja yang cukup banyak dan masih tingginya angka pengangguran.
- 2) Kondisi hubungan industrial yang relatif kondusif;

b. Faktor Penghambat

- 1) Belum diterapkannya penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) dengan tegas dan jelas sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN)

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- 2) Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi
- 3) Belum optimalnya personil dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya
- 4) Belum optimalnya penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi

Kondisi Eksternal

a. Faktor Pendorong

- 1) Kota Bekasi sebagai Penyangga Ibukota DKI sehingga untuk peluang wirasusaha baru memadai.
- 2) Tingginya minat masyarakat dalam mengikuti fasilitasi maupun pelatihan
- 3.) Teknologi informasi yang semakin maju

b. Faktor Penghambat

- 1) Masih tingginya angka pengangguran
- 2) Persaingan produk sejenis dari luar daerah
- 4) Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja
- 5) Banyak tenaga kerja belum bersertifikasi kompetensi (belum lulus uji kompetensi)
- 6) Rendahnya motivasi untuk bersaing di pasar kerja lokal, nasional maupun global
- 7) Minat masyarakat yang terbatas pada jenis jenis pekerjaan tertentu

Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi meliputi:

1. Faktor Internal

a. Peluang

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- 1) Kota Bekasi memiliki potensi sebagai daerah kawasan industrial ternatif di Kota Bekasi dimanfaatkan serta angkatan kerja yang cukup banyak;
- 2) Kondisi hubungan industrial yang relative kondusif;

b. Tantangan

- 1) Belum diterapkannya penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) dengan tegas dan jelas sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 2) Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi;
- 3) Belum optimalnya penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi.

2. Faktor Eksternal

- 1). Kota Bekasi memiliki potensi sebagai daerah kawasan industrial ternatif di Kota Bekasi dimanfaatkan serta angkatan kerja yang cukup banyak;
- 2) Kondisi hubungan industrial yang relative kondusif

2.6 Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindak lanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja, maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah pelayanan di sektor ketenagakerjaan meliputi penempatan tenaga kerja, Pelatihan Tenaga kerja dan peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor ketenagakerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

ada maupun aspek- aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu- isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Permasalahan yang kerap dihadapi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi adalah :

1. Masih cukup besarnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2. Rendahnya produktifitas tenaga kerja
3. Terbatasnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kualifikasi jabatan fungsional tertentu seperti Mediator Hubungan

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor tenaga kerja serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kota Bekasi yakni sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah penyerapan angkatan kerja
2. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.9. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi Tahun 2023 Kota Bekasi “Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Sektor Unggulan” Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Prioritas pembangunan Daerah Kota Bekasi tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan, dan efektifitas penurunan angka pengangguran;
2. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2023 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2023 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi Tahun 2023

URAIAN	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023													
	NO	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT		SATUAN	PAGU PER JENIS BELANJA							PAGU (Rp)
				INDIKATOR	TARGET		B. Pegawai	B. Barang & Jasa	B. Bunga	B. Subsidi	B. Hibah	B. Sosia l	B. Moda l	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							14,018,278,000	3,556,950,000						22,881,928,000
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Program Perencanaan Tenaga Kerja		Persentase kesempatan kerja terhadap penduduk 15 tahun keatas	5%	Dokumen								
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Program Perencanaan Tenaga Kerja		Tersusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja	100%	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		Program Perencanaan Tenaga Kerja		Tersusunnya dokumen perencanaan	100%	Dokumen	10,000,000							50,000,000
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		Program Perencanaan Tenaga Kerja		Tersusunnya dokumen pelaporan	Dokumen	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		Program Perencanaan Tenaga Kerja		Tersusunnya dokumen perencanaan	100%	Dokumen	0	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Program Perencanaan Tenaga Kerja		Jumlah capaian evaluasi kinerja	100%		0	0	0	0	0	0	0	0

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Administrasi Keuangan		Administrasi jasa tenaga/ teknis perkantoran												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi jasa tenaga/ teknis perkantoran	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	Dokumen	11.904.028.000	0	0	0	0	0	0	0	11.904.028.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Administrasi jasa tenaga/ teknis perkantoran				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi		Jumlah kegiatan yang diverifikasi				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		Jumlah laporan yang tersusun				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Tersajinya laporan tanggapan pemeriksaan				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Program perencanaan Tenaga Kerja	Tersusunnya laporan capaian kinerja	Dokumen	Dokumen	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		Program perencanaan Tenaga Kerja	Tersusunnya laporan keuangan	100%	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		Program perencanaan Tenaga Kerja	Tersusunnya Laporan			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Program perencanaan Tenaga Kerja	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100%	Dokumen	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Program Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran	100%	Surat	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Program Administrasi Perkantoran		Pelayanan administrasi perkantoran	100%	Bulan	0	324.000.000	0	0	0	0	0	324.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Program Administrasi Perkantoran					0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS		Program Administrasi Perkantoran					0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Program Administrasi Perkantoran					0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Program Administrasi Perkantoran					0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Program Administrasi Perkantoran					0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Program Administrasi Perkantoran		Terlayannya kebersihan kantor	100%	m ²	0	1,533,600,000	0	0	0	0	0	1.533.600.000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Program Administrasi Perkantoran					0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Alat Tulis Kantor		Program Administrasi Perkantoran		Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	100%	Buah	0	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Program Administrasi Perkantoran		terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan	100%	Buah	0	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Program Administrasi Perkantoran		Jumlah komponen listrik	100%	Bua	0	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan		Program Administrasi					0	0	0	0	0	0	0	0

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kantor		Perkantoran												
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Program Administrasi Perkantoran	Jumlah Peralatan Rumah Tangga			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Program Administrasi Perkantoran	Tersedianya bahan bacaan	100%	Exemplar	0	87.500.000	0	0	0	0	0	0	87.500.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Program Administrasi Perkantoran				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Makanan dan Minuman		Program Administrasi Perkantoran	Terakomodirnya makanan dan minuman penunjang dalam memberikan pelayanan	100%	Boks	0	122.800.000	0	0	0	0	0	0	122.800.000
Rapat Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Program Administrasi Perkantoran	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	Perjalanan	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	250.000.000
Pengadaan Mobil Jabatan		Program Administrasi Perkantoran				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Program Administrasi Perkantoran				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		Program Administrasi Perkantoran				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Program Administrasi Perkantoran				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas		Program Administrasi Perkantoran				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Program Administrasi Perkantoran				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Mebeleur		Program				0	0	0	0	0	0	0	0	0

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

		Administrasi Perkantoran												
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan		Program Administrasi Perkantoran				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas		Program Administrasi Perkantoran				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Program Administrasi Perkantoran		Jumlah pemeliharaan rutin bekala	100%	x hari	0	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		Program Administrasi Perkantoran					0	0	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Program Administrasi Perkantoran		Jumlah kendaraan Dinas	100%	Unit	0	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan		Program Administrasi Perkantoran					0	0	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Program Administrasi Perkantoran					0	0	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas		Program Administrasi Perkantoran					0	0	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Program Administrasi Perkantoran		pemeliharaan berkala	100%	Gedung	0	285.000.000	0	0	0	0	0	285.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala		Program Administrasi					0	0	0	0	0	0	0	0

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Mebeleur		Perkantoran												
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan		Program Administrasi Perkantoran				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas		Program Administrasi Perkantoran				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor		Program Administrasi Perkantoran				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan		Program Administrasi Perkantoran				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional		Program Administrasi Perkantoran				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Program Administrasi Perkantoran		Persentase Jumlah Kehadiran	100%	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi		Program Administrasi Perkantoran				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Program Administrasi Perkantoran				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan		Program Administrasi Perkantoran				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Pakaian Korpri		Program Administrasi Perkantoran				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		Program Administrasi Perkantoran				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Program Administrasi Perkantoran				0	0	0	0	0	0	0	0	0

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas		Program Administrasi Perkantoran					0	0	0	0	0	0	0	0
Pemindahan Tugas PNS		Program Administrasi Perkantoran					0	0	0	0	0	0	0	0
Pendidikan dan Pelatihan Formal		Program Administrasi Perkantoran					0	0	0	0	0	0	0	0
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Program Administrasi Perkantoran					0	0	0	0	0	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Program Administrasi Perkantoran		Jumlah Peserta Bimtek	100%	Orang	0	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.	Program Peningkatan Kapasitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1.	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	100%		0	0	0	0	0	0	0	0
			2.	Persentase Pencari Kerja yang memiliki Sertifikasi Keahlian	5%		0	0	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							0	0	0	0	0	0	0	0
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Pelatihan Peningkatan produktivitas		Terlaksananya pelatihan peningkatan produktivitas	50	Orang	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000
		Bimbingan Konsultasi peningkatan produktivitas		Terlaksananya bimbingan konsultasi	50	Orang	0	0	0	0	0	0	0	120.000.000
		Peningkatan			50	Orang	0	0	0	0	0	0	0	120.000.000

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

		kapasitas dan Produktivitas Pelaku usaha											
		Pelatihan manjamen kewirausahaa n bagi wirausaha baru	terlaksananya pelatihan wirausaha	Orang	Orang	0	0	0	0	0	0	0	600.000.000
		Penyelenggar aan pola magang kerja diperusahaan	Pola magang diperusahan	Orang	Orang	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000
		Pelatihan berbasis kompetensi	Pelatihan kompestensi	Orang	Orang	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000.000
		Pembinaan LPK Swasta	Pembinaan LPK	LPK	LPK	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000
		Kajian Pendirian BLK	Kajian	BLK	BLK	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000
PROGRAM PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN KOTA	1.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	23.34%		0	0	0	0	0	0	0	0
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota						0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja			Pengembangan aplikasi pelayanan AK.1 yg mudah diakses pencari kerja & optimalisasi pelayanan serta surveilance ISO 9001:2015 bidang pelayanan;	23.000 Pencaker	Pencaker	0	0	0	0	0	0	0	200.000000
			Penyelenggaraan	1.500 orang	Orang	0	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

				Jobfiar										
				Pembinaan terhadap pekerja migrant Indonesia		Orang	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000
Program Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1.	Hubungan Industrial		Menurunnya Angka Sengketa Pengusaha dengan Pekerja	100 %		0	0	0	0	0	0	0	0
		Bimtek tentang mogok kerja dan unjuk rasa		Penyelesaian perselisihan	5 %		0	0	0	0	0	0	0	300.000.000
		Focus Group Discusion LKS		Hubungan mogok kerja			0	0	0	0	0	0	0	200.000.000
		Bimtek struktur skala upah kepada perusahaan se kota		Hubungan industrial			0	0	0	0	0	0	0	250.000.000
		UMK		Hubungan industrial			0	0	0	0	0	0	0	300.000.000
		Reker dan sinargitas LKS Tripartit		Hubungan industrial			0	0	0	0	0	0	0	200.000.000
		Peaksanaan HUT Buruh		Hubungan Industrial			0	0	0	0	0	0	0	100.000.000
		Pelaksanaan pelayanan		Hubungan			0	0	0	0	0	0	0	250.000.000

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

		persyaratan kerja berbasis online E PP dan E PKB		Industrial										
--	--	---	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.10. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi . Sesuai dengan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu menggunakan pendekatan atas-bawah (*top-down*) yaitu perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah (*top-down*) diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Namun demikian sesuai tugasnya untuk menyelenggarakan urusan penunjang pemerintah daerah di bidang tenaga kerja mempunyai kewajiban mendukung kebijakan Kepala Daerah tahun 2024-2026 . yaitu :

1. Pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul
3. Kemandirian ekonomi daerah

Disinilah semua data dari para pemangku kepentingan berawal dan berakhir. Usulan dari semua pemangku kepentingan disusun sebagai bahan untuk didiskusikan, ditelaah secara kritis oleh semua pemangku kepentingan pengusul, dan konfirmasi kembali sebelum diproses menjadi Rencana Kerja (RENJA). Telaahan usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan selajutnya disajikan dalam tabel di bawah ini.

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan tahun 2024

Program		Indikator		Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator
1		2		3	4	5	6
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja		Persentase cakupan ketersediaan dokumen	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase tenaga kerja yang berkompeten yang siap ditempatkan	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro
2.	Program pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.	Persentase peningkatan kompetensi bagi pencari kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n
						Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
				Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

		2.	Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Kompetensi
							dan Produktivitas Tenaga Kerja
3.	Program Penempatan Tenaga kerja	1.	Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
						Job Fair/Bursa Kerja	Job Fair/Bursa Kerja
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

						Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
		2.	Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) berizin				
4.	Program Hubungan Industrial		Persentase sengketa pengusaha dengan pekerja yang diselesaikan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
						Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

						Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
--	--	--	--	--	--	--	--

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam Bidang Tenaga Kerja.

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

NO	Prioritas Daerah	Alokasi 2024
1	2	3
1.	Peaksanaanl Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	724.955.000.-

SUMBER DATA Dinas Tenaga Kerja

Tabel 4.2
Prioritas Pembangunan Daerah

NO	Prioritas Daerah	Alokasi 2024
1	2	3
1.	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	258.295.000.-

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Sumber data Dinas Tenaga Kerja

3.1. Program dan Kegiatan

Didalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melaksanakan 5 (lima) program, dengan 11 (sembilan) kegiatan dan 15 (dua puluh satu) sub kegiatan kegiatan sebagai berikut

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.3. Program dan Kegiatan

Didalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melaksanakan 5 (lima) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Program dan kegiatan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SEBELUM DESK	Renstra 2024	Pagu 2023	SETELAH DESK			
						Rencana Tahun 2024			Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024		
						Pagu Indikatif (Rp.)			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	26,620,079,440	26,620,079,440	16,210,137,980			16,235,137,980	
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	300,000,000	300,000,000	-	Persentase cakupan ketersediaan dokumen		-	
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	300,000,000	300,000,000	-			-	

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2	07	02	2.01	01	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	300,000,000	300,000,000	-		100%	-	PAD
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1,200,000,000	1,200,000,000	983,955,000	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja		983,955,000	
									Persentase peningkatan kompetensi bagi pencari kerja			
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	700,000,000	700,000,000	724,450,000			724,450,000	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	500,000,000	500,000,000	724,450,000		100%	724,450,000	PAD
					Pola Magang kerja di Perusahaan	100,000,000	100,000,000				-	
					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	100,000,000	100,000,000	-		100%	-	PAD
2	07	03	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	290,000,000	290,000,000	66,450,000			66,450,000	
					Peningkatan produktivitas tenaga kerja	90,000,000	90,000,000				-	DROP
					Konsultasi Produktivitas tenaga kerja	100,000,000	100,000,000				-	DROP
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	100,000,000	100,000,000	66,450,000		100%	66,450,000	PAD

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	210,000,000	210,000,000	173,600,000			173,600,000	
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	210,000,000	210,000,000	173,600,000		100%	173,600,000	PAD
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	450,000,000	450,000,000	258,295,000	Persentase Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan		258,295,000	
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000	150,000,000	109,020,000			109,020,000	
					Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	150,000,000	150,000,000	109,020,000			109,020,000	PAD
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	150,000,000	150,000,000	97,385,000			97,385,000	
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	150,000,000	150,000,000	97,385,000		100%	97,385,000	PAD
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000	150,000,000	51,890,000	-		51,890,000	
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	150,000,000	150,000,000	51,890,000		100%	51,890,000	PAD
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	900,000,000	900,000,000	520,513,000	Persentase Penanganan Sengketa pengusaha dengan pekerja		520,513,000	
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	900,000,000	900,000,000	520,513,000			520,513,000	

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	450,000,000	450,000,000	322,019,000		100%	322,019,000	PAD
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	100,000,000	79,079,000		100%	79,079,000	PAD
					Penyelenggaraan Verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi, pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	100,000,000	100,000,000	-				
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	250,000,000	250,000,000	119,415,000		100%	119,415,000	PAD
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23,770,079,440	23,770,079,440	14,447,374,980			14,472,374,980	
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55,000,000	55,000,000	3,000,000			3,000,000	
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55,000,000	55,000,000	3,000,000		100%	3,000,000	PAD
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17,075,000,000	17,075,000,000	11,228,405,000			11,228,405,000	

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17,000,000,000	17,000,000,000	11,225,405,000		100%	11,225,405,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	75,000,000	75,000,000	3,000,000		100%	3,000,000	PAD
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	400,000,000	400,000,000	20,000,000			-	
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200,000,000	200,000,000	20,000,000		100%	-	PAD
2	07	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50,000,000	50,000,000	-		100%	-	PAD
2	07	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150,000,000	150,000,000	-		100%	-	-
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	999,810,000	999,810,000	376,925,000			391,925,000	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51,530,000	51,530,000	10,000,000		100%	-	PAD
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	567,480,000	567,480,000	324,925,000		100%	324,925,000	PAD
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,000,000	50,000,000	35,000,000		100%	35,000,000	PAD
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235,000,000	235,000,000	7,000,000		100%	32,000,000	PAD
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	95,800,000	95,800,000	-		100%	-	PAD

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	689,000,000	689,000,000	-			-	
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	689,000,000	689,000,000	-		100%	-	PAD
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,026,269,440	3,026,269,440	2,470,644,980			2,470,644,980	
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,000,000	20,000,000	15,000,000		100%	15,000,000	PAD
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	509,400,000	509,400,000	338,400,000		100%	338,400,000	PAD
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,496,869,440	2,496,869,440	2,117,244,980		100%	2,117,244,980	PAD
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	865,000,000	865,000,000	348,400,000			378,400,000	
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	475,000,000	475,000,000	122,400,000		100%	154,300,000	PAD
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216,000,000	216,000,000	26,000,000		100%	18,900,000	PAD
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	174,000,000	174,000,000	50,000,000		100%	55,200,000	PAD

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

					Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	550,000,000	550,000,000	150,000,000		100%	150,000,000	PAD
					Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	110,000,000	110,000,000			100%	-	PAD
TOTAL						26,620,079,440	26,620,079,440	16,210,137,980			16,235,137,980	

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB V

penutup

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2024 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RKPD) daerah dan Renstra Dinas Tenaga Kerja yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian target, program kegiatan.

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

2. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
3. melaksanakan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan
4. menjaga konsistensi antara RPD, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
5. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,

Drs. ASEP GUNAWAN, M.Si